

DAFTAR ISI

1. *Public Private Community Partnership* dalam Pembangunan Terminal Transit Paso Kota Ambon
MIKE J. ROLOBESSY _____ **1-15**
2. Peran Komunikasi dan Penggunaan Media Massa pada Kelompok Peternak Sapi di kabupaten Maluku Tenggara
VRANSISCA KISSYA _____ **16-30**
3. Rezin Politik dan Problem Pembangunan di Indonesia
NURAINY LATUCONSINA _____ **31-41**
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah
ISRA MUKSIN _____ **42-50**
5. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
YUDI DE FRETES _____ **51-60**
6. “Perilaku Masyarakat Terhadap Budaya Hidup Bersih” (Studi Kasus Pada Masyarakat Negeri Batu Merah Kampung RT 03 / RW 03Kecamatan Sirimau Kota Ambon).
BAHRUDIN HASAN _____ **61-70**
7. Program Jamkesmas di Puskesmas Tomalehu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
ILYAS IBRAHIM _____ **71-80**
8. Penegakan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik yang Berkualitas Di Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon
HEIN EDUARD SIMATAUW _____ **81-90**
9. Efektifitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2dtk) Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
SITI GAIF NINGKEULA _____ **91-106**
10. Analisa Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Pulau Pulau Kur Kota Tual
LUSIA RENTANUBUN _____ **107-139**
11. Peran Institusi Lokal dalam Mencegah Konflik Sosial antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Waihatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
ISHAKA LALIHUN _____ **140-166**

Public Private Community Partnership dalam Pembangunan Terminal Transit Paso Kota Ambon

Oleh

MIKE JURNIDA ROLOBESSY*

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang studi kemitraan antara pemerintah, Swasta Dan masyarakat pada pembangunan Terminal Transit Passo Kota Ambon, sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Terminal Transit Passo, pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo akan dibangun dengan menggunakan konsep kemitraan dan dikerjakan tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Namun berdasarkan kondisi eksisting pekerjaan pembangunan Terminal Transit Passo sampai sekarang belum selesai dibangun dan belum terlihat adanya jalinan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif kualitatif dan melalui disain ini diperoleh gambaran fenomena, fakta atau data empirik tentang kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan pihak swasta masih belum teraplikasi dengan baik. Peran dan dominasi pemerintah dalam proyek pembangunan terminal transit Passo ini menjadi sangat besar, peran swasta masih sebatas kontraktor pelaksana. Belum ada investor yang menanamkan modalnya pada pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo, Persoalan pembiayaan, pengaturan tempat usaha bagi PKL dan penertiban angkutan umum dari luar pulau Ambon dalam lokasi terminal transit Passo masih merupakan kendala bagi pemerintah kota Ambon dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat. Sehingga kemitraan yang berazaskan yang saling membutuhkan, menguatkan dan menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo belum dapat tercapai.

Temuan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan yang melahirkan konsep baru komitmen untuk transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan menjadi tolak ukur untuk berjalannya kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan Terminal Transit Passo yang berazaskan saling membutuhkan, menguatkan dan menguntungkan dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi. Kata Kunci: Kemitraan, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat merupakan terobosan yang dilakukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma tata pemerintahan yang baik menekankan arti pentingnya kesejajaran hubungan antara institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sederajat dan

* Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura, Ambon

saling kontrol (check and balance) untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen, terhadap komponen lainnya. Dalam penyelenggaraannya, sektor publik atau pemerintah tidak lagi dominan, tetapi masyarakat dan sektor swasta juga berperan dalam pemerintahan (governance). Interaksi yang terjalin dalam kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan dan aturan yang telah di sepakati bersama antar pihak yang bermitra.

Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam bentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat setidaknya mempunyai beberapa alasan¹ yaitu; 1). Sebagai alternatif untuk menyelesaikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yaitu anggaran pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan maupun dalam menyediakan layanan publik sementara kebutuhan dan tuntutan masyarakat semakin meningkat. 2). Keterlibatan atau kemitraan swasta dan masyarakat merupakan bentuk kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan. 3). Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat bisa menciptakan transparansi dan peningkatan kualitas proses pembangunan. 4). Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor swasta dan perekonomian masyarakat agar lebih berkembang.

Studi yang dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa untuk mendukung pembangunan infrastruktur tahun 2005-2009 diperlukan dana sebesar Rp 613 triliun, sementara kemampuan investasi pemerintah diprediksikan hanya mencapai Rp 346,5 triliun (kumulatif) atau 56,5%, dengan demikian ada kekurangan dana sebesar Rp 266,5 triliun atau 43,5%. Hal ini memperjelas bahwa pemerintah tidak dapat berdiri sendiri untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan yang memadai.²

Secara normatif keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan Terminal Transit Passo telah di atur dalam Perda No.2 Tahun 2008 tentang Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Passo, yang menyebutkan bahwa pendanaan pembangunan kawasan Passo merupakan kewenangan pemerintah Kota Ambon dan bantuan dari pihak lain yaitu, pemerintah atasan (Pemerintah Pusat dan Provinsi) dan swasta atau masyarakat. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi penggunaan anggaran di fokuskan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengaturan, serta untuk proyek-proyek fisik berskala besar dimana pemerintah Kota Ambon belum mampu untuk mendanai. Bantuan dari pihak swasta di peruntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat profit oriented, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang di keluarkan oleh pemerintah. Bantuan dari masyarakat di fokuskan pada proses pembebasan lahan tentunya dengan mengikuti aturan yang ada, persiapan tenaga kerja serta dukungan dari masyarakat pelaku usaha kecil untuk bersedia beraktifitas pada lokasi Terminal Transit Passo.

¹ Tim Kajian PKP2A III Lembaga Administrasi Negara Samarinda, 2009. "Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan" Jurnal Borneo Administrator Vol 5 No 1.

²http://eprints.undip.ac.id/15816/1/Sidiq_Sudibyo.pdf[1/03/2011]

Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo, dominasi pemerintah Kota Ambon dalam pembiayaan pembangunan terminal terlihat jelas, hal ini terlihat dari rincian anggaran program pembangunan kawasan Passo, dimana terlihat pada sub program percepatan pelaksanaan pembangunan fisik Terminal Transit Passo sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi Maluku, APBD Kota Ambon dan Swasta dan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit pembiayaannya hanya bersumber dari APBD Kota Ambon.

Berdasarkan pengamatan awal, dalam pekerjaan pembangunan Terminal Transit Passo pemerintah dari tahapan pertama sampai tahapan ketiga pekerjaan pemerintah Kota Ambon yang mendominasi seluruh pekerjaan tersebut. Teruma dalam penyediaan dana pembangunan Terminal Transit Passo maupun pengambilan keputusan, kemudian dominasi pemerintah Kota Ambon pelaksanaan Pembangunan Terminal Transit Passo masih terus berlangsung, hal ini terlihat dari pernyataan Wali Kota Ambon menyatakan bahwa kelanjutan Pembangunan Terminal Transit Passo akan dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan, pertanyaannya adalah kenapa pemerintah Kota Ambon tidak melakukan langkah-langkah inovatif untuk mencari peluang investasi dari pihak swasta dalam membiayai kelanjutan pembangunan terminal tersebut. Padahal secara teknis bentuk keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan di Kota Ambon telah di atur dalam Perda No 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ambon Tahun 2006-2011, sementara untuk Pembangunan Terminal Transit Passo telah di programkan dalam Perda No 2 Tahun 2008 tentang Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan, Passo yaitu pada proyek percepatan pelaksanaan pembangunan fisik Terminal Transit, program pengembangan fasilitas sosial, fasilitas umum lainnya.

Secara empirik dari berbagai gambaran masalah dalam proses pelaksanaan pembangunan kawasan Terminal Transit Passo yang mendukung penelitian ini adalah; 1) Keterlibatan sektor swasta sebagai mitra pemerintah pada Pembangunan Terminal Transit belum terjalin, karena pemerintah Kota Ambon masih mendominasi pelaksanaan pembangunan tersebut dalam hal pembiayaan proyek. 2). Pemerintah Kota Ambon mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan kembali Pembangunan Terminal Transit Passo, 3). Masalah ganti rugi lahan pada lokasi jalan akses menuju Terminal Transit Passo belum terselesaikan, 4). Lembaga atau institusi daerah yang berfungsi untuk mengurus kewenangan investasi belum tersedia.

Permasalahan yang terungkap dalam latar belakang penelitian adalah masih kuatnya dominasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo. Hal ini mempertegas bahwa kemitraan pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan Terminal Transit Passo Kota Ambon belum berjalan. Sementara pemerintah Kota Ambon masih kekurangan dana untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan Terminal Transit tersebut. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Ambon dalam proses pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam Pembangunan Terminal Transit Passo Kota Ambon?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh konsep baru yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya konsep-konsep tentang kemitraan dengan kegunaan penelitian:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan terutama memperjelas konsep tentang kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para peneliti yang ini mengembangkan lebih lanjut mengenai konsep kemitraan, khususnya studi tentang kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan dengan objek kajian yang berbeda dan fokus penelitian lainnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Ambon dalam rangka menjalin kemitraan dengan swasta maupun masyarakat dalam pembangunan di Kota Ambon dengan berazaskan saling membutuhkan, menguatkan dan menguntungkan.

II. METODE

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh, mendalam dan memberikan uraian yang bersifat deskriptif dari suatu kolektifitas yang tetap terjamin dilakukan. Peneliti berinteraksi dengan konteks sosial, maka interaksi tersebut dilakukan peneliti, dengan terlibat secara langsung dilokasi penelitian. Peneliti mengamati keseluruhan aktifitas yang terjadi di lokasi penelitian baik itu pekerjaan fisik pembangunan terminal transit, aktifitas ekonomi maupun transportasi serta melakukan pengamatan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon, pihak swasta maupun masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan pengelolaan Terminal Ttransit Passo maupun pengelolaannya, melalui wawancara mendalam atau pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini yang diamati adalah orang, yaitu para pelaksana pembangunan fisik terminal transit, pelaku ekonomi yang beraktifitas dilokasi terminal transit serta pengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan maupun pengelolaan Terminal Transit Passo. Dengan demikian penelitian ini dicirikan oleh kegiatan pengumpulan data, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, kegiatan, pandangan, sikap yang ditujukan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang terjadi serta proses kemitraan yang dijalankan.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berakar pada data dan teori, yang berfungsi sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi atau perangkat proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional. Hal ini berarti melalui teori yang dipakai dalam penelitian ini kemudian dielaborasi dengan kenyataan bagaimana sebenarnya kemitraan dalam pembangunan Terminal Transit Passo faktanya di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil akhir tersebut sekaligus dapat memperkuat teori, melemahkan teori, atau justru memunculkan teori baru yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan terkait dengan penelitian ini. Melalui disain ini dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat

serta hubungan fenomenal tentang kemitraan dalam pembangunan Terminal Transit Passo di Kota Ambon, secara utuh dan multi dimensional sehingga dapat dilakukan katagorisasi dan perumusan hipotesis sebagai temuan penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di lokasi pembangunan Terminal Transit Passo dan Pasar Terminal Transit Passo yang berada di wilayah desa Passo kecamatan baguala Kota Ambon. Selain itu peneliti juga melakukan pencarian data pada Dinas Perhubungan Kota Ambon, Bappeda Kota Ambon, Kantor Desa Passo, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon dan Kantor PT Reminal Utama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kemitraan Yang Saling Membutuhkan Dalam Pembangunan Terminal Transit Passo

Penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan pembangunan fisik Terminal Transit Passo, dari tahap pertama pekerjaan sampai dengan tahap ke tiga pekerjaan sumber pembiayaannya masih didominasi oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Ambon, sementara sumber pembiayaan yang berasal dari sektor swasta belum terlihat jelas. Sumber pendanaan pekerjaan pembangunan Terminal Transit Passo masih bersumber pada APBD Kota Ambon, hal ini disebabkan oleh belum ditemukannya konsep kemitraan yang maksimal untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo. Kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pembangunan Terminal Transit Passo selain masalah pendanaan yang masih didominasi oleh pemerintah, keterlibatan pihak swasta yang hanya sebagai kontraktor pelaksanaan bukan sebagai investor dalam pembangunan Terminal Transit Passo, hal ini terlihat dari seluruh pekerjaan pembangunan fisik terminal masih sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta dengan jenis pekerjaan sub kontrak.

Kemudian kemitraan dalam pembangunan Terminal Transit Passo yang terjalin belum menggambarkan penyatuan atau pemanfaatan sumberdaya dari pemerintah maupun pihak swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang memiliki resource berupa otoritas formal dan kedudukan, dengan sendirinya mempunyai kekuatan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di satu sisi pihak swasta dapat bertindak sebagai investor untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Terminal Transit. Dengan demikian jika penyatuan dua sumberdaya ini dapat dilakukan akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo.

Menurut peneliti fenomena yang terlihat dari hubungan kemitraan dalam pembangunan Terminal Transit Passo memperlihatkan hubungan kerjasama yang bersifat Subordinate, di mana kemitraan yang terjadi antara pemerintah dengan swasta yang memiliki status, kemampuan dan kekuatan yang tidak seimbang satu sama lainnya, dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainnya, melainkan berada pada hubungan atas-bawah, kuat-lemah, Sulistiyani (2004:131-132). Kondisi ini, mengakibatkan tidak ada sharing sumberdaya, resiko, maupun peran atau fungsi yang seimbang dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan Terminal Transit Passo. Merujuk pada prinsip-prinsip dasar dalam

menjalankan kemitraan, sebagaimana yang disampaikan oleh Lienhard (2006) dan Brudney (2007) dalam Dwiyanto (2010:263) yang menyebutkan bahwa, kerjasama dalam kemitraan harus berlandaskan pada unsur-unsur pokok kemitraan yaitu; 1). Kerjasama setidaknya melibatkan suatu lembaga pemerintah atas suatu lembaga swasta, 2).Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik, kompatibel dan saling melengkapi, 3).Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi, 4).Memiliki otoritas jangka panjang, 5).Kerjasama merupakan penyatuan, pemanfaatan dan senergi dari sumber daya pemerintah maupun swasta, 6).Berbagi resiko, 7). Perolehan dalam efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian kemitraan yang saling membutuhkan dalam pelaksanaan Terminal Transit Passo belum terwujud.

3.2. Kemitraan Yang Saling Memperkuat Dalam Pembangunan Terminal Transit Passo

Terdapat sejumlah model kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti yang diuraikan oleh Istianto (2011:69-75) yakni : (1) Partisipasi Sektor Swasta (Private Sector Participation), (2) Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (Public-Private Partnership), (3) Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Public, Private and Community Partnership). Pada model kemitraan yang pertama, Private Sector Participation (PSP) merupakan jenis kemitraan yang pada umumnya tidak padat modal, sektor swasta melakukan pengadaan dan operasionalisasi prasarana sedangkan Pemerintah sebagai penyedia prasarana. Dalam hal ini Pemerintah tetap sebagai pemilik aset dan pengendali pelaksanaan kerjasama. Model Kemitraan yang kedua yang selanjutnya sering disingkat Public Private Partnership (PPP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 2005. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa model kemitraan PPP ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengalangan dana swasta (Pasal 3 huruf a). Strategi kemitraan PPP ini merupakan kemitraan pemerintah swasta yang melibatkan investasi yang besar/padat modal dimana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan. Dalam hal ini pemerintah tetap sebagai pemilik aset dan pengendali pelaksanaan kerjasama. Kemitraan yang ketiga adalah Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang kemudian sering disebut PPCP. Model kemitraan ini melibatkan unsur masyarakat dalam proses pembangunan. PPCP merupakan kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang secara bersama-sama melakukan kerjasama dalam pembangunan dan atau pengelolaan prasarana dan sarana. Investasi yang dilakukan dapat bersifat padat modal ataupun tidak padat modal tergantung dari kebutuhan masyarakat dan kemampuan mitra. Mitra Swasta dan Masyarakat membiayai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah tetap sebagai pemilik aset serta pengatur dan pengendali pelaksanaan kerjasamanya kerjasama. Hubungan kemitraan ini berdasarkan atas kepercayaan, dedikasi dalam mencapai tujuan, dan saling mengerti akan harapan-harapan serta nilai-nilai setiap partisipan. Mengharapkan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya, kesempatan dalam

berinovasi, dan peningkatan secara berkelanjutan atas kualitas produk dan pelayanan.

Salah satu alasan perlunya model kemitraan pemerintah dengan swasta yang akan di gunakan karena; berbagai keterbatasan, dimana pemerintah mengalami keterbatasan dana, pengalaman maupun ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyediaan layanan, alasan yang lain yaitu model Public Swasta Partnership yang ada, tidak selalu cocok digunakan dalam setiap kondisi kerana tiap jenis pelayanan memiliki karakter khusus yang tidak selalu tetap di sandingkan dengan model Public Private Partnership. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Public Private Partnership bila memenuhi kendala sebagai berikut (The Stationery Office, 2000):

1. Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan bila diberikan oleh pemerintah;
2. Pihak swasta dapat menjamin bahwa pelayanan dapat diberikan lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah;
3. Ada dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan pihak swasta sebagai penyedia pelayanan;
4. Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta;
5. Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pelibatan pihak swasta dalam penyediaan jasa pelayanan;
6. Luaran dari pelayanan dapat dengan mudah diukur dan ditetapkan tarifnya dengan rasional;
7. Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif penggunaan jasa layanan;
8. Ada peluang inovasi dalam penyediaan pelayanan;
9. Ada rekam jejak (track record) atau pengalaman kemitraan antara pemerintah dan swasta yang sudah dilakukan sebelumnya;
10. Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan tersebut.

Jika salah satu dari alasan-alasan tersebut tidak terpenuhi, maka model PPP sebaiknya tidak diterapkan karena model tersebut, rentan dengan risiko-risiko finansial maupun politis yang dapat membebani masyarakat pengguna jasa layanan di kemudian hari. Sementara dalam pembangunan Terminal Transit Passo, kemitraan yang terjalin antara pemerintah Kota Ambon dengan pihak swasta memperlihatkan bentuk kemitraan build and transfer yang merupakan suatu perjanjian kerja dimana pihak swasta hanya membangun proyek tersebut. Setelah selesai dibangunnya proyek tersebut, maka proyek yang bersangkutan kemudian di serahkan kepada pemerintah tanpa ada hak kontraktor untuk mengelola proyek tersebut. Dengan demikian kemitraan yang terlihat belum menunjukkan suatu model kemitraan yang sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian penjelasan tentang model-model kemitraan pemerintah dengan swasta seperti digambarkan diatas, menunjukkan bahwa pada hekekatnya pembangunan infrastruktur dalam hal pendanaan memerlukan kajian yang matang, cermat dan seksama untuk menentukan pilihan model kemitraan. Penentuan masing-masing model kemitraan tersebut harus dilandasi oleh tujuan yang jelas dan persyaratan yang tertentu yang harus dipenuhi sehingga kedua belah pihak mendapatkan asaz manfaat yang seimbang dan menguatkan, yakni disatu pihak bagi pemerintah kepentingan publik mendapatkan pelayanan yang

lebih baik dari pemerintah atas tersedianya berbagai macam kebutuhan kehidupan seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ruang publik, transportasi, kebutuhan bahan pokok tercukupi, dan lain-lain. Sedangkan bagi swasta akan mendapatkan keuntungan yang dapat untuk pengembangan bisnisnya. Sehingga dari berbagai pilihan model kemitraan tersebut, ketika akan dipilih untuk digunakan dalam jaringan kemitraan, jaringan kemitraan tersebut merupakan jaringan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

3.3. Kemitraan Yang Saling Menguntungkan Dalam Pembangunan Terminal Transit Passo

Wujud kemitraan yang saling menguntungkan dapat terbangun apabila kemitraan dalam operasionalisasinya tidak terdapat hubungan yang bersifat subordinasi, namun hubungan yang setara bagi semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, kemitraan memiliki prinsip yang harus menjadi kesepakatan diantara yang bermitra dan harus ditegakkan dalam pelaksanaannya meliputi: prinsip gotong royong, prinsip keterbukaan (transparency), prinsip penegakkan hukum (hak dan kewajiban) dan prinsip keberlanjutan (sustainability).

Jaminan agar pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dapat berhasil dengan baik, maka perlu diupayakan oleh berbagai pihak hal yang terkait dengan; (1) komitmen, (2) kemitraan, dan (3) pemberdayaan, Marsono (2008:17):

- a. Komitmen (commitment), merupakan kesepakatan mendalam dari semua pihak yang yang terkait berhubungan dengan upaya mewujudkan suatu keberhasilan. Komitmen hanya dapat tercipta apabila terdapat prakondisi yang mendukung, yaitu antara lain: (a) tersedianya informasi yang sah dalam organisasi (valid information); (b) kesepakatan untuk membuat pilihan bebas (choice); (c) saling percaya diantara sesama antar pihak yang bermitra (trust); (d) ketentuan yang konstruktif dan dinamis (openess); (e) mengembangkan rasa tanggungjawab (responsibility); (f) keterlibatan setiap mitra untuk berkonsultasi secara optimal (involvement).
- b. Kemitraan (Alignment) yaitu adanya kebersamaan dalam kesetaraan untuk mencapai satu kesamaan derap langkah, irama dan arah perjalanan organisasi. Kemitraan juga bermaksud penggalangan kekuatan untuk menciptakan nilai tambah dari ikatan yang telah dibuat bersama. Beberapa kondisi yang diperlukan demi terwujudnya kemitraan antara lain: (a) adanya tata nilai, suasana dan kekuasaan menjadi mitra bersama (shared values, norms and power; (b) adanya suasana kesederajatan dalam berbagai aspek kemitraan (equality); (c) adanya jaringan kerja yang saling menunjang pertumbuhan bersama (networking); dan (d) adanya kemitraan yang efektif dan produktif (collaboration).
- c. Pemberdayaan (Empowerment), yaitu adanya proses transformasi ataupun instruksi dari berbagai pihak yang berdampak pada saling menumbuhkan, saling meningkatkan, saling memperkuat dan menambah nilai daya yang secara potensial terdapat dalam organisasi untuk diarahkan sebagai energi organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

Keuntungan-keuntungan dari segi pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat disekitar Terminal Transit Passo, adalah

meningkatnya harga tanah, biasanya nilai tanah dan bangunan akan lebih tinggi dengan adanya pembangunan fasilitas publik. Harga tanah yang tadinya sangat rendah berubah menjadi tinggi nilainya setelah ada Terminal Transit Passo dan Pasar Transit. Selainnya harga tanah yang meningkat, permintaan jasa atau layanan oleh kendaraan bermotor serta pemenuhan kebutuhan penumpang yang menggunakan kendaraan juga meningkat, sehingga ini berarti bahwa terbuka juga peluang-peluang baru dalam berusaha dan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sekitar Terminal Transit Passo. Selain naiknya harga tanah dan tumbuhnya kegiatan ekonomi karu, juga terjadi peningkatan tenaga kerja, permintaan bahan bangunan meningkat, adanya penyebaran kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja dan usaha lebih luas. Kesemuanya itu dapat menggerakkan roda aktifitas perekonomian dan secara tidak langsung membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah pedagang, terutama jumlah pedagang kelas ekonomi lemah atau menengah ke bawah, apalagi pasca konflik sosial di Kota Ambon, jumlah masyarakat yang melakukan aktifitas perekonomian semakin bertambah dari waktu ke waktu.

Sementara keuntungan yang didapat oleh pihak pemerintah kota Ambon, dengan adanya Terminal Transit Passo yaitu arus lalu lintas barang dan jasa menjadi lancar, mengurangi kemacetan di pusat kota Ambon, namun dari sisi kemitraan pemerintah Kota Ambon belum mendapatkan suatu keuntungan kerana jalinan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta belum berjalan.

Kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat juga akan berdampak pada pengembangan aspek kultural dimana dapat terjadi perubahan perilaku berusaha dengan cara penerapan aspek-aspek moderen seperti perencanaan produksi dan pemasaran, manajemen belanja dan keuangan dan adanya administrasi usaha bagi bagi pedagang kakilima yang berusaha di pasar Terminal Transit Passo. Pada prinsipnya, Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Memperluas kesempatan kerja;
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional;

Kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat juga akan berdampak pada pengembangan aspek kultural suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki budaya dan kebiasaan masyarakat yang merupakan budaya lokal yang melingkupi hidup mereka secara turun temurun. Proses pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah sejatinya tidak mengabaikan aspek budaya masyarakat dimana pembangunan itu dilaksanakan. Dalam hal ini semua pihak yang terlibat baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat harus diuntungkan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, baik keuntungan dari segi ekonomi, sosial, dan bahkan diuntungkan dari aspek budayanya.

Kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada pengembangan aspek kultural dimana dapat terjadi perubahan perilaku berusaha dengan cara penerapan aspek-aspek moderen seperti perencanaan produksi dan pemasaran, manajemen belanja dan keuangan dan adanya administrasi usaha bagi bagi pedagang kakilima yang berusaha di pasar Terminal Transit Passo.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan terminal transit Passo dikemukakan simpulan sebagai berikut;

1. Kemitraan yang saling membutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo dengan unsur motivasi hubungan kemitraan dan pengelolaan kemitraan yang terjalin belum menghasilkan suatu hubungan yang menggambarkan adanya penyatuan atau pemanfaatan sumberdaya dari pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat, belum terlihat adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam hal modal, tenaga dan keahlian sehingga.
2. Kemitraan yang saling menguatkan meliputi jenis dan syarat kerjasama dan dampak dari kemitraan sekalipun telah dijalankan berdasarkan syarat-syarat, mekanisme dan prosedur namun belum menjalin kelancarannya, karena masih terbentur pada perilaku dari pihak pemerintah dan pihak swasta dalam menjalankan syarat-syarat atau prosedur dalam penentuan pelaksana proyek pembangunan Terminal Transit Passo yang ketidak transparansi, hubungan kemitraan dalam pembangunan Terminal Transit Passo memperlihatkan hubungan kerjasama yang bersifat Subordinate, di mana kemitraan yang terjadi antara pemerintah dengan swasta yang memiliki status, kemampuan dan kekuatan yang tidak seimbang satu sama lainnya, hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainnya, melainkan berada pada hubungan atas-bawah, kuat-lemah, jika dalam pelaksanaan Pembangunan Terminal Transit Passo terjadi penyatuan dua sumberdaya ini dapat dilakukan akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo. Dengan demikian kemitraan yang saling membutuhkan dalam pelaksanaan Terminal Transit Passo belum terwujud.
3. Kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Transit Passo, dengan unsur pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan, dan pengembangan aspek kultural waupun telah ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat, pedagang kakilima maupun penyedia layanan transportasi, namun belum dapat dikatakan sebagai dampak dari kemitraan yang saling menguntungkan melainkan karena keberadaan Terminal Transit Passo.

Temuan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan yang melahirkan konsep baru bahwa; kepastian hukum, komitmen untuk transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan menjadi tolak ukur untuk

berjalannya kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan Terminal Transit Passo yang berazaskan saling membutuhkan, menguatkan dan menguntungkan dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi.

Saran

- a. Kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan fisik Terminal Transit Passo dapat terlaksana, jika pemerintah Kota Ambon dapat melakukan hubungan yang kolaboratif dengan pihak swasta yang sama-sama dapat menyumbangkan modalnya, sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak yang di atur dalam sebuah kontrak, dengan prinsip-prinsip dasar dalam kemitraan.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Terminal Transit Passo semestinya menyepakati secara bersama konsep kemitraan yang di jalankan dalam proses pembangunan dan pengelolaan terminal transit Passo.
- c. Kebijakan mengenai kemitraan antara pemerintah dengan swasta maupun pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan Terminal Transit Passo semestinya diatur dalam suatu aturan hukum.
- d. Pengelolaan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam Pembangunan Terminal Transit Passo mestinya di kolala secara inovatif yang berlandaskan kebutuhan dan masalah sehingga dalam proses berjalannya kemitraan pihak-pihak yang bermitra mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahman dan Rahim-Nya, Disertasi yang berjudul, " Pembangunan Terminal Trnaist Passo Kota Ambon, Studi Tentang Kemitraan Antara Pemerintah dengan Swasta dan Masyarakat" Alhamdulillah dapat diselesaikan.

Penulisan disertasi ini merupakan tahapan akhir study pada Program Pascasarjana dan prasyarat untuk memperoleh gelar Doktor bidang Ilmu Pemerintahan pada Universitas Padjadjaran. Dalam proses penelitian sampai penulisan Disertasi ini, penulis menemui berbagai kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Disertasi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo. MA. Sebagai Ketua Tim Promotor; Bapak Prof. Dr. Drs. H. Dede Mariana. M.Si dan Bapak Prof. H. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D., sebagai anggota Tim Promotor yang selalu siap tidak mengenal lelah memberikan bimbingan dan arahan, motivasi untuk selalu optimis serta memberikan curahan ilmu maupun pengalaman dalam proses penyelesaian disertasi ini dan tercapu untuk menyelesaikan studi ini.

Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat, Bapak Prof. Drs, H.A. Djadja

Saefullah, M.A; Prof. Dr. Drs. H. Samugio Ibu Redjo, M.S., dan Ibu. Dr. Dra. H. Mudiwati Rachmatunnisa, MA. sebagai Tim Oponen Ahli, yang berkenan memberikan saran, kritik dan koreksi mulai saat seminar usulan penelitian sampai pada ujian naska Disertasi yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan Disertasi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Pattimura, dan Dekan Fisip Universitas Pattimura yang telah memberikan kesempatan dan persetujuan kepada penulis untuk mengikuti program Doktor pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Watloly; Prof. Dr. Drs. J. Ajawaila. M.Si (almarhum); dan Drs. Novi Sahetapi, M.Si. (almarhum) yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan rekomendasi kepada penulis, untuk mengikuti program Doktor pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk Almarhun Prof. Joop dan Pak Novi semoga di tempatkan pada tempat yang terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Bapak Drs. Angganota Ura dan segenap staf; yang telah menyediakan waktu dan tempat kepada penulis dan membantu penulis dengan memberikan data-data untuk penelitian yang penulis lakukan.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Ambon, Ibu Ir. Febby Mail, MTP dan jajaran staf yang telah menyediakan waktu, tempat dan informasi kepada penulis serta membantu penulis dengan memberikan data-data untuk penelitian yang penulis lakukan.

Terima kasih Kepada, Bapak Saleh Mahulauw, SE. MEP; Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon dan Kepala Badan Inverstasi dan Promosi Kota Ambon, yang telah menyediakan waktu, tempat dan informasi kepada penulis serta membantu penulis dengan memberikan data-data untuk penelitian yang penulis lakukan.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada Upu Latu Passo (kepala desa Passo) beserta jajarannya yang telah menyediakan waktu, tempat dan informasi kepada penulis serta membantu penulis dengan memberikan data-data untuk penelitian yang penulis lakukan.

Terima kasih Kepada Teman-teman Mahasiswa Program Doktor. Bidang Ilmu Pemerintahan yang seangkatan, Dr Dra. H. Feni Rosalia, M.Si; Dr. Drs. H. Syarif Makhya, M.Si. Dr, Drs. Rahman Mulyaman, M.Si. dan Dr. Fernandes Simangunsong, S.SPD. M, Si. atas dukungan dan motivasi yang di berikan kepada penulis, semoga jalilan silaturahmi kita tetap langgeng dan abadi.

Terimah kasih kepada seluruh staf pengajar/Dosen pada program pascasarjana khususnya pada program studi Ilmu Pemerintahan yang telah membuka dan memperluas cakrawala ilmiah dan teori-teori melalui kuliah-kuliahnya. Serta segenap civitas administrasi dan staf perpustakaan Pascasarjana Fisip Universitas Padjadjaran yang selalu melayani penulis dengan ramah.

Terima kasih yang setinggi-tingginya dari lubuk hati terdalam penulis haturkan kepada ayahanda tercinta H. Muhamad Rolobessy dan Ibunda Hj, Siti Aisyah; Tersayang ayahanda Achmad Tan, Ibunda Hj. Berkah Masuku, dan Kakak dan adik beserta keluarganya, yang tiada putus – putusnya memberikan dorongan disertai do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Teristimewa penulis haturkan kepadabelahan jiwa, Suami dan anak-anakku Ir. Muhamad Isnain Masuku; Nadindra Aulia Masuku, Al Hakim Bismar Masuku dan Malati Rachmadika Masuku, atas pengorbanan yang tak terhingga, dukungan dan kekuatan cinta kalianlah yang selalu menjadi spririt dan motivasi kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya Penulis menyadari walaupun telah berbuat maksimal, disertasi ini masih membutuhkan masukan yang bersifat membangun, maka dengan penuh kerendahan hati Penulis siap menerima saran dan kritik demi penyempurnaannya. Mudah-mudahan karya sederhana ini mampu memberikan inspirasi bagi pekerjaan lanjutan yang lebih besar dan mendalam. Akhirnya penulis berharap kiranya Disertasi ini dapat bermanfaat untuk kajian akademis maupun bahan referensi penyempurnaan penyelenggaraan kemitraan dalam pembangunan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adji Gunawan, 2010, *The Smart Handbook of Public Private Partnership*, Jakarta Rene Publisher.
- Alfen, 2009, *Public Private Partnership in Infrastructure Development Case Studies from Asia and Europe*, Faculty of Civil Engineering, Weimar, Germany.
- Dikun Suyono, 2005. *Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur " Bunga Rampai Pembangunan Kota Di Indonesia abad 21" Konsep dan Pendekatan Perkotaan Di Indonesia*. URDI-YSS- Jakarta: LPFE-UI.
- Dwiyanto Agus2010. *Manajemen Pelayanan Pemerintah : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Flynn, Norman 1997,. *Public Sector Management*, 3rd Ed., London: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.
- Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat (memadukan pertumbuhan dan pemerataan)*, Jakarta;PT. Pustaka Cidesindo
- Hetifah Sj Sumarto, 2004. *Inovasi Kemitraan dan Good Governance*, 20 Prakarsa Inovasi dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta; Buku Obor.
- Innocent Chukwuma, 2005. *Government Civil Society in Nigeria : Problem and Prospect*. Cleen Foundation Justice Sector Reform : Kaduna.
- IstiantoBambang, 2011. *PRIVATISASI Dalam Model Public Private Partnership*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal dan Penelitian Ilmiah:

- Akintola Akintoye and Matthias Beck, 2009. *Policy, Finance and Management for Public-Private Partnership*, Blackwell Publishing Ltd. ISBN: 978-1-405-17791-7.
- Arunkumar, R.& Kotreshwar, G. 2006, *Risk Management in Commercial Banks – A Case Study of Public and Private Sector Banks*, Indian Institute of Capital Markets 9th Capital Markets Conference Paper, India.
- Departemen Dalam Negeri & JICA. 2004. "The Partnership Organization", *Organizational Development Practitioner*, vol 33, number 22, in www.partnership.org/index.html00000

- Dwiyanto Agus, 2004. Reorientasi Ilmu Administrasi Publik. Dari Government ke Governance. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas.
- Emmanuel Akampurira, et al, 2009. Stakeholder Perception in the Factor Constraining the Development and Implementation of Public Private Partnership in the Uganda Electricity Sector, *Jurnal of Energy in Southern Africa*. Vol 20 NO 2.
- Endarti Wahyu Esa, 2005. Interaksi Antara Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Transportasi Perkotaan (Studi Pada Pelayanan bus Di Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik* Vol. II. No 2. Oktober
- Rahmatunnisa Mudiayati, 2012. Analisis Kritis Atas Good Governance. *Jurnal Ilmiah UNIKOM*.
- Susanto Bambang & Muhammed Ali Berawi, 2012., Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia., *Jurnal Transportasi* Vol. 12 No. 2. Agustus 2012: 93-102.
- Sastrosasmito 1997, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, No 13, Th V, Yogyakarta; Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, UGM

Sumber Internet:

- www.partnership.org/index.html [20/02/2011]
- <http://marsono-manajemenpemerintah.blogspot.com/2008/10/konsep-dan-model-kemitraan-kemitraan.html> [24/02/2011]
- <http://www.cib2007.com/papers/CIDB2008.pdf> [24/05/2011]
- <http://www.scribd.com/doc/73909673/6/Karakteristik-Public-Private-Partnership-PPP> [23/03/2011]
- (<http://www.pkm.dikti.net>). [24/01/2012]

Daftar Dokumen

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon 2006-2026
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon Tahun 2006-2011
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon 2006-2016
- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Passo-Kota Ambon Tahun 2006-2011
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Khusus Passo Tahun 2003-2008
- Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Passo Kota Ambon
- Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Passo Tahun 2008-2013
- PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1990, tentang Pedoman Bagi Kemitraan Antara Perusahaan-perusahaan Pemerintah Daerah (BUMD) dengan Pihak Ketiga (sektor swasta)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat Direktorat Bina Sistem Prasarana, Pedoman Teknik Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Raya Dalam Kota dan Antar Kota.

Perpres No 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Perpres No 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Perpres No 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Permenhub No. 270 Tahun 2006 tentang Proyek-Proyek di Bidang Transportasi

Permen Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2012 Tentang Penduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.